

Demokrasi, Otonomi Daerah, dan Sistem Perlambangan

R.H.A.A. Djajusman Tanudikusumah

ABSTRAK

Penyakralan hingga kini belum banyak berubah. Sisa-sisa masa lalu terus saja berlanjut tanpa mencoba menyelami makna tersebut. Peristiwa turun dengan jalan mundur meniti tangga setelah menerima bendera pada setiap upacara 17 Agustus, memberi kesan khusus, seolah-olah tokoh sakral tidak boleh dibelakangi (dipantati). Kenyataannya, setelah penerima bendera itu sampai meniti tanah, ia lalu berbalik menghadap ke tiang bendera. Jadi, membelakangi juga akhirnya.

Sebuah Proses

Kata-kata *Good Life* yang sering menjadi acuan dalam ilmu negara, semula dikumandangkan oleh MacIver (1950), sekaligus mengaitkan dengan demokrasi. Ia menyatakan bahwa ...*democracy grows into its being* (demokrasi sedang menumbuhkan dirinya). Di sini jelas bahwa demokrasi dilihatnya sebagai sesuatu yang senantiasa dalam pertumbuhan.

Hal tersebut tampak bagi Indonesia sendiri, yang ternyata memang senantiasa dalam proses pertumbuhan, apakah itu diartikan sebagai 'barang masih baru' atau sedang belajar berdemokrasi. Dibanding dengan kata-kata demokrasi terdahulu, seperti pada tahun 1945, kemudian dikaitkan dengan demokrasi Pancasila dan macam-macam perkaitan lainnya, apabila orang-orang sedang berbeda pendapat. Pada era reformasi saat ini, sarat dengan gejala-gejala perbedaan pendapat yang rupanya sedang sengaja digelar tanpa ada yang menjadi penghalang. Lebih-lebih lagi, tatkala kita saat ini, justru sedang menghadapi otonomi daerah yang tentunya akan sangat beragam dalam berbagai pendapat. Perbedaan pendapat antara pusat pemerintahan dan daerah akan memuncak, di kala

proses demokrasi tumbuh dalam ketinggian dirinya.

Yang dipertanyakan dalam kajian ini, apakah demokrasi dapat bergandengan dengan 'feodalisme'? Apakah feodalisme tidak menghambat pertumbuhan demokrasi sekalipun melalui sistem perlambangan? Menjelang 17 Agustus 2001 yang lalu (54 tahun merdeka), muncul pemikiran, apa yang akan terjadi dalam peringatan peristiwa tersebut? Sekalipun melalui sistem perlambangan, meski kelihatannya sangat sederhana, apakah sinyal-sinyal demokrasi (sungguh-sungguhnya demokrasi) terejawantahkan dalam upacara 17 Agustus tersebut? Pertanyaan itu muncul mengingat peristiwa 17 Agustus adalah momentum akbar dalam berkomunikasi yang memancar ke seluruh penjuru Tanah Air. Tindak komunikasi tersebut mempererat persatuan dan kesatuan Nusantara Indonesia.

Dari pengamatan melalui televisi, terlihat jelas saat Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra, tidak pakai Pusaka lagi), khususnya lagi ketika seorang gadis yang tentunya terpilih untuk melaksanakan penerimaan bendera yang akan dikibarkan, naik tangga untuk menerima bendera tersebut dari Kepala Negara. Apa yang terjadi kemudian? Begitu ia menerima bendera, saat ia harus turun

tangga (untuk menerima bendera, terlebih dahulu ia harus naik tangga menuju Presiden), maka ia dengan membawa bendera tersebut *harus mundur meniti tangga*. Terkesan dengan segera bahwa turun dengan mundur itu adalah pensakralan terhadap atasan tertinggi. Kesan utama yang timbul saat itu, juga adalah pemfeodalan perlambangan yang ternyata masih harus bergandengan dengan alam demokrasi yang sedang dijalani Bangsa Indonesia.

Pensakralan rupanya masih tidak mengalami perubahan. Sisa-sisa masa lalu, sadar atau tak sadar, diteruskan, tanpa menyelami makna tersebut.

Otonomi Daerah

Saya tidak mengikuti proses termaksud di daerah-daerah. Tapi biasanya, peristiwa di pusat menjadi acuan daerah, termasuk mundurnya seseorang setelah menerima bendera yang akan dikibarkan.

Persoalannya adalah, mengapa bentuk feodalisme itu mengganggu? Peristiwa turun dengan jalan mundur setelah menerima bendera, memberi kesan yang lebih khusus lagi, seolah-olah tokoh sakral tidak boleh dibelakangi (*dipantati*). Kenyatannya, setelah penerima bendera itu sampai meniti tanah, ia lalu berbalik menghadap ke tiang bendera. Jadi *toh* membelakangi juga akhirnya. Komandan Upacara sendiri ketika menghadap ke tiang bendera bersama seluruh jajaran yang diberi komando olehnya, *toh* membelakangi inspektur upacara, dalam hal ini presiden yang menyampaikan bendera tersebut kepada gadis bersangkutan.

Mengenai hal ini, seorang psikolog yang saya wawancarai menjawab bahwa mundur menuruni tangga setelah menerima bendera yang akan dikibarkan adalah lebih baik daripada turun tangga langsung tanpa mundur. Katanya malahan akan lebih hati-hati. Dia lupa bahwa yang harus dikaji adalah persoalan perlambangan, bukan persoalan fisiologis.

Semua yang berada di lapangan, baik Pasukan Pengibar Bendera maupun barisan Merah Putih (dari Akabri atau Paswalpres) semuanya

'membelakangi/memantati' presiden sebagai Inspektur Upacara'.

Yang juga menyolok dalam peristiwa tersebut adalah cara berjalan Pasukan Merah Putih (pengibar bersama anak-anak SMA dari semua propinsi). Cara berjalan mereka, khususnya saat ayunan tangan ke atas, sangat ekstrem. Selain tangan yang berayun, bahu pun ikut naik turun. Terkesan lagi, anak-anak muda ini, khususnya putra-putra generasi muda menjadi sangat kaku. Mungkin kekakuan itu disengaja agar terkesan kokoh, penuh kekuatan/percaya diri serta penuh gairah dan dinamika. Tetapi, kesan yang timbul menjadi lain. Lebih eleganlah kiranya jika cara berjalan Pasukan Merah Putih, ayunannya sangat semampai, tidak terkesan dibuat-buat, sehingga bahu mereka pun tidak ikut turun naik. Mengapa tidak seragam dengan pasukan mereka? Ayunan yang terlalu dikokohkan melambangkan generasi muda yang kurang berkepribadian. Sedang pasukan kibar seharusnya mengikuti irama demokrasi yang sedang kita panggungkan, tidak memberi kesan santai, tetapi juga tidak kaku. Apakah memang kekakuan itu urgen dalam peristiwa demikian? Saya kira tidak perlu, yang penting cukup melambangkan kecekatan yang dipertunjukkan pada waktu membuka bendera yang akan dinaikkan.

Daerah-daerah dengan otonominya perlu mengacu keprotokalan pusat tetapi harus pula dikaji elegansi yang menyertai alam dan suasana demokrasi. Jauh dari ketegangan, penuh optimisme terhadap masa depan, tetapi dengan sifat wajar-wajar, suatu perlambangan yang penuh muatan kesegaran dan kewajaran.

Otonomi Daerah-Pusat

Democracy grows into its being. Dalam pertumbuhannya, demokrasi tidak dapat berjalan seiring dengan neo-feodalisme yang sepertinya terkesan kepada zaman-zaman jauh di waktu lampau. Pusat kekuasaan maupun kekuasaan di daerah haruslah menciptakan fondasi (*foundation*) bagi masa depan yang segar, terutama lagi bagi para generasi muda. Merekalah yang akan mengisi jajaran masa kini.

Selain itu, beragamnya berbagai kebijakan pusat maupun daerah, pasti akan timbul seiring dengan perkembangan mereka masing-masing. Tetapi, untuk menjaga keutuhan di samping keanekaragaman pusat-daerah, perlambangan ini dapat mengikat persatuan dan kesatuan nusantara.

Kajian ini dapat dianggap sebagai sebuah *Vista Point*, tempat kita hening sebentar untuk berefleksi diri, apa yang perlu kita perbuat lagi. Apa yang dapat dianggap sebagai tindakan positif atau negatif.

Tidak lain agar wacana dan kenyataan dapat semakin seiring dengan berjalannya demokrasi yang sedang dirasakan maupun dipahami. Perlambangan merupakan perangkat beton-tulangannya komunikasi agar ia tak lapuk ditelan zaman. Kita tetap dapat berbeda pendapat sesuai citra demokrasi tetapi juga ada yang bisa kita praktikkan tanpa merusak pasangan demokrasi antara pusat dan daerah.

Dalam kaitan itu, wajarlah bila kita ingat kepada yang terdahulu, yang telah banyak berkorban bagi masa depan yang sedang kita lalui maupun yang akan dijalani para penerus kita, yakni generasi muda.


Adalah lebih tepat kiranya bila Presiden Megawati Soekarno Putri pada saat mengajak yang hadir untuk mengheningkan cipta—tentunya untuk para pahlawan yang telah mendahului kita, maupun kesiapan semua unsur menghadapi masa depan yang perlu diperingati—

tidak hanya sekadar memberikan aba-aba “Mengheningkan cipta mulai”. Memang, semua (ribuan) orang telah mengetahui maksud aba-aba tersebut, tetapi seyogianya kata-kata presiden lebih baik dilengkapi agar melambangkan kesempurnaan yang memadai.

Democracy grows into its being. Ia sedang dalam pertumbuhan, terutama bagi Indonesia. Wajarlah bila semua itu perlu mendapat kajian terus menerus agar lebih kokoh dan lebih bermanfaat, tentunya dengan memanjatkan do'a ke hadapan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang agar lebih diridhoi-Nya.

Tuhan Maha Besar, Maha Besarlah Tuhan.
Amin, amin ya robbul 'alamin.

Epilog

Dalam rangka *social value engineering*, khususnya menjelang terciptanya citra komunikasi yang harmonis di masa depan, maka dengan *good life* dari Mac Iver, kita akan mencapai masyarakat adil dan makmur. Goethe sendiri menyerukan pesan abadi yakni *mehr licht!* 

Daftar Pustaka

- Tanudikusumah, R.H.A.A. Djajusman, *Citra Komunikasi*, 1990.
MacIver, 1960, *Sociology*.